

CPL

Mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai dari empat konsensus Nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) untuk memandu diri sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme serta menyadari hak dan kewajibannya berdasarkan hukum dan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. (A3)



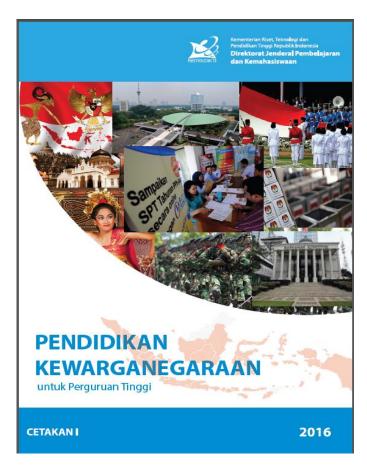


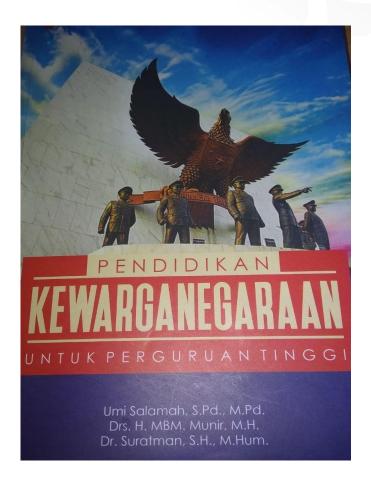
Nilai-Nilai Kebangsaan

Pertemuan 1, 2



Diadopsi dari sumber:







Sub-CPMK

Mahasiswa dapat menjelaskan empat konsensus nasional Indonesia sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. (A2)



Materi:

- 1. Proses Membangsa dan Perubahan Nilai.
 - 2. Pergerakan Nasional.
 - 3. Empat Konsensus Nasional.
- 4. Nilai dalam Konsensus Dasar Membangsa & Menegara



1.1. Proses Membangsa dan Perubahan Nilai



- Proses sejarah mengalami perubahan, nilai-nilai kebangsaan pun ikut berubah, dalam arti setiap periode memiliki nilai yang dianut masyarakatnya.
- □ Di Indonesia nilai-nilai itu mengalami perubahan dalam beberapa periode sejarah:
 - 1). Era Nusantara (sebelum Belanda datang).
 - 2). Era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
 - 3). Era Penjajahan Belanda (Nederlandsch-Indie).
 - 4). Era Pergerakan.



Era Nusantara

- Istilah Nusantara (dipakai sekarang) diartikan sebagai nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia (KBBI, 1993, hal. 695).
- Prof. A.B. Lapian, pidato pengukuhan sebagai Guru Besar sejarah UI, mengatakan:

"Istilah Nusantara yang sudah ditemukan dalam beberapa naskah kuno, mula-mula dalam Nagarakertagama dan demikian pula dalam naskah yang lebih belakangan, seperti Kidung Sunda, digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Pulau Jawa: sebuah ungkapan yang terdiri dari kata Jawa kuno nusa (pulau) dan antara (lain). Jadi yang dimaksudkan adalah pulau-pulau lain. Akan tetapi sebelum Perang Dunia II, nama ini diperluas artinya dan mencakup seluruh kepulauan Indonesia."



- ☐ Masih menurut Prof. Lapian: Ki Hajar Dewantara, menggunakan istilah Nusantara sebagai sinonim untuk seluruh kepulauan, termasuk pula pulau Jawa.
- Ratusan kerajaan tradisional dengan nilai hidup bersama saling bersaling satu sama lain.
- Kerajaan-kerajaan bersentuhan dengan penjelajah bangsa Asing: Portugis (berperang dengan kerajaan Ternate) Belanda, dan Inggris. Dan, Belandalah yang paling lama bersentuhan dengan warga Nusantara (menguasai perdagangan rempah-rempah) lewat perusahaan dagangnya: Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC, pada 1602).
- □ VOC diperkenankan (Belanda) menggunakan kekuatan bersenjata dalam kegiatan dagangnya.



Era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Pada periode ini, dua sistem nilai:

- (1) **Feodalisme**, yaitu kekuasaan melalui seorang raja yang menjalankan kekuasaan secara otoriter-feodalistik, dan berkuasa penuh secara diktatorial. Pada tingkat lokal pun (kabupaten/kadipaten) bupati-bupati berkuasa secara otoriter-diktatorial.
- (2) Kolonialisme, yaitu VOC melakukan penaklukan terhadap kerajaan Nusantara tradisional untuk meluaskan kekuasaan dagangnya. Supaya keuntungan ekonomi dipertahankan makan penguasaan wilayah & politik dilakukan. Kekuasaan kolonialisme mengembangkan penguasaan wilayah & politik untuk mengembangkan kekuasaan dagang/ekonomi.



Era Penjajahan Belanda(Nederlandsch-Indie)

- □ Seperti dalam periode VOC, pada era penjajahan, dua sistem kekuasaan berkembang, yaitu:
 - 1. Feodalisme kerajaan Nusantara.
 - 2. Kolonialisme VOC/Belanda.
- □ Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mengatur & mempertahankan kekuasaan.



Feodalisme

- □ Sistem feodalistik (berkembang dalam proses panjang dengan tradisi dijalankan dalam waktu lama (ribuan tahun).
- Kekuasaan absolut (dijalankan oleh raja/sultan bersama lingkungan keluarga/yang dipercaya keluarga).
- Tatanan masyarakat berjenjang/berstrata dengan jenjang tertinggi: raja/sultan beserta keluarga; para bangsawan; golongan agama; pedagang; dan rakyat kebanyakan.
- Setiap kerajaan memiliki aturan sendiri yang dijalankan berdasarkan pola tradisi masing-masing.



Kolonialisme

- Kekuasaan dibangun secara otoriter-diktatorial.
- □ Kekuasaan tingkat pusat berpusat di Batavia (Gubernur Jenderal).
- □ Propinsi ada Gubernur, di daerah residen, asisten residen, wedana, asisten wedana, dll.
- Kekuasaan tradisional dipertahankan tetapi tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda.
- Dengan demikian ada dua sistem yang dijalankan Belanda di wilayah jajahan (Nederlandsch-Indie), (sistem feodalisme & sistem kolonialisme).



1.2. Pergerakan Nasional



1.2. Pergerakan Nasional (Lanj)

- □ Timbulnya pergerakan Nasional yang bertujuan mengubah keadaan nasib bangsa-bangsa etnik di negeri jajahan.
- □ Lembaga-lembaga pendidikan yang dibuka pemerintah kolonial (STOVIA/sekolah kedokteran/Jakarta atau sekolah teknik tinggi (ITB) melahirkan sejumlah kaum terdidik dan tercerahkan untuk tampil mengubah nasib bangsanya (tertindas-terhinakan menjadi warga warga merdeka yang berharkat kemanusiaan).
- □ Strategi baru diciptakan (strategi perlawanan → abad 17-19, otot/kekuatan fisik diubah menjadi strategi otak-rasional.
- Tidak menggunakan senjata-senjata fisik, tetapi berupa senjata yang bertumpuh pada kemampuan otak-rasional, seperti: penguatan organisasi, ideologi, media massa, dan dialog.



1.2. Pergerakan Nasional (Lanj)

- Diawali organisasi pendidikan beretnis Jawa, Boedi Oetomo (1908), lalu organisasi lain dengan ideologinya, seperti Indische Partij (tiga serangkai: Douwes Dekker/orang Belanda, dr. Cipto Mangunkusumo; dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).
- □ Pergerakan Nasional sejak 1908 1942 (datangnya pasukan Jepang) berhasil merumuskan pelbagai hal konkrit sebagai landasan membangun kehidupan bersama, yaitu:
 - (1). Menciptakan *kesadaran baru* di dalam masyarakat bangsa terjajah untuk bersama-sama mengubah keadaan hidup (nasib) mereka dari manusia terjajah menuju dan menjadi manusia (bangsa) merdeka.



1.2. Pergerakan Nasional (Lanj)

- (2). Merumuskan *nama baru* untuk sebutan diri mereka secara bersama: *Indonesia*.
- (3). Menciptakan semangat persatuan dari warga etnik yang banyak menjadi satu kesatuan di dalam simbol nama : Indonesia.
- (4). Menciptakan kesepakatan untuk membangun pemerintahan dan bangsa-negara yang berlandaskan pada sistem *demokrasi*.



1.3. Empat Konsensus Nasional



1.3. Empat Konsensus Nasional (Lanj)

Empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara Indonesia adalah:

A. Pancasila



B. UUD 1945





1.3. Empat Konsensus Nasional (Lanj)

c. NKRI



D. Bhinneka Tunggal Ika





1.4. Nilai dalam Konsensus Dasar Membangsa & Menegara



1.4. Nilai dalam Konsensus Dasar Membangsa & Menegara (Lanj)

Hakekat Nilai-nilai Kebangsaan:

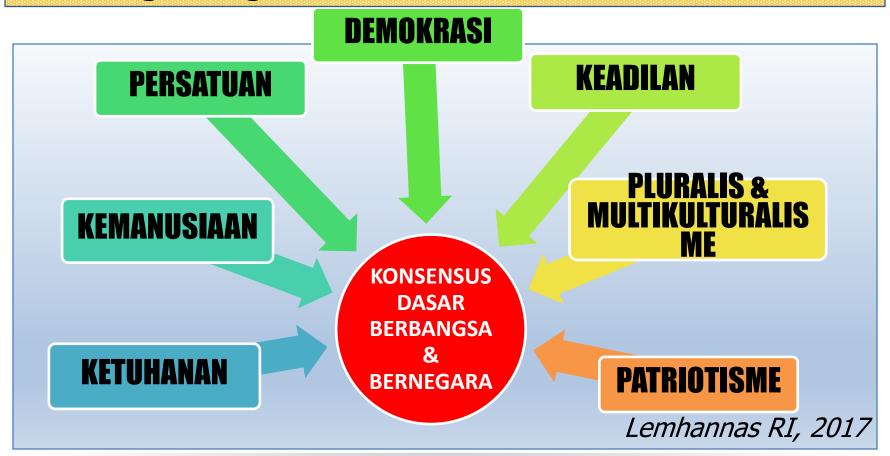
"Nilai-nilai kebangsaan pada hakekatnya merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik, yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma dan etika kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungal Ika."

Nilai-nilai kebangsaan menjadi panduan & pedoman bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.



1.4. Nilai dalam Konsensus Dasar hm Membangsa & Menegara (Lanj Università) Bunda Mulia

Nilai-nilai yang Terkandung dalam Konsensus Dasar Membangsa-Negara Indonesia





1.4. Nilai dalam Konsensus Dasarum Membangsa & Menegara (Lanj)

Nilai-nilai yang Terkandung dalam Konsensus Dasar Membangsa-Negara Indonesia





Ringkasan



Ringkasan (Lanj)

- Perubahan sejarah bangsa memengaruhi nilai yang dianut bangsa dan Negara dari zaman Majapahit, penjajahan Belanda, sampai zaman kemerdekaan sekarang ini.
- □ Di zaman Majapahit berkembang kerajaan-kerajaan tradisional dengan sistem/nilai feodalisme-nya. Para raja menjalankan kekuasaan yang bersifat otoriter-feodalistik, dan berkuasa penuh secara diktatorial.



Ringkasan (Lanj)

- Zaman penjajahan Belanda nilai kolonialisme, kekuasaan dibangun secara otoriter-diktatorial. Kekuasaan tradisional dipertahankan tetapi tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda menjalankan dua sistem di wilayah jajahan, yaitu: sistem feodalisme & sistem kolonialisme.
- Dewasa ini nilai kebangsaan dihayati secara demokratis dalam empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.





TERIMA KASIH